

Kebijakan Jepang terhadap Uji Coba Senjata oleh Korea Utara

Sandyka Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta,
Indonesia

sandykakur@gmail.com

Abstract

This paper is intended to investigate the response of the Japanese against weapons test by North Korea were considered threats to regional security and the security of Japan it self. The method used in the writing of this proposal uses a qualitative method using secondary data analysis which uses data that are non numbering, this data can be in the form of reports, newsletters and statements. Data collection techniques used for writing is the study of literature such as books, journals, magazines, newspaper articles that have relevance to this writing. , Japan's response on the actions taken by North Korea are internally on Japan itself make changes to Japan's defense policy to improve the status of Justice Defense Agency into a Ministry of Defense, as well as amend the Act so that the Japanese military can operate outside of Japan. Externally, Japan started again to organize its relationships with countries in East Asia such as South Korea and China, as well as doing the realignment of defense cooperation relationship with the United States as well as play an active role in international security cooperation.

Keywords : North Korea, Weapons, Japan, Alliance

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, di wilayah Asia Timur Korea Utara memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara tetangganya salah satunya adalah Jepang, hal ini didasari

pada sejarah masalah, bermula dari kemenangan Jepang dalam perang antara Russia dan Jepang yang berlangsung selama satu tahun pada tahun 1904 sampai 1905 membuat Jepang memiliki pengaruh di semenanjung Korea, dimana sebelumnya Korea berada di bawah pengaruh Tiongkok dan Russia, hal ini dimantapkan lagi dengan penadatangan konveksi Korea-Jepang. Penadatangan tersebut secara tidak langsung memberikan Jepang kontrol administratif penuh atas urusan luar negeri semenanjung Korea, sedangkan pada tahun 1907 pasca lima hari lengsernya Raja *Kojong*, Jepang mendapat kuasa penuh atas administratif dalam negeri semenanjung Korea dan dimulailah kolonialisme Jepang secara penuh atas semenanjung Korea¹, kolonialisme Jepang atas semenanjung Korea yang dimulai dari tahun 1910 berakhir sampai saat terjadinya akhir Perang Dunia Kedua 1945 dimana Jepang mengalami kekalahan. Sekarang ini Korea Utara menjadi salah satu negara yang disorot oleh dunia karena aktifitas-aktifitasnya yang secara gencar melakukan pengembangan teknologi senjata militernya, hal tersebut tentu saja membuat Jepang gerah atas apa yang dilakukan oleh Korea Utara, dimana letak Jepang secara geografis berada di sebelah timur dari Korea Utara. Sejak awal kepemimpinan rezim *Kim Jong Un* ketegangan di Semenanjung Korea mulai memanas terkait keputusannya untuk tidak menghormati apa yang telah disetujui untuk moratorium uji coba nuklir dan rudal jarak jauh di tunjukkan dengan peluncuran satelit yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain itu pada tahun 2012 Korea Utara berkomitmen untuk melakukan penanggulangan nuklir, pengujian rudal jarak jauh dan suspensi pengayaan uranium di Yongbon dibawah pengawasan IAEA (*International Atomic Energy Agency*)². Uji coba senjata yang membuat Jepang benar-benar gerah atas tindakan Korea Utara adalah peluncuran roket jarak jauh milik Korea Utara yang dikatakan sebagai tujuan ilmiah sempat melewati bagian selatan dari pulau Okinawa pada tanggal 7

¹ Kwan-young Kim. 1999. "Japan and Korea : A Turbulent History."

² Djelantik Sukawarsini.2015."Asia Pasifik konflik, kerjasama dan relasi antarkawasan." Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Februari 2016 lalu yang membuat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tidak terima atas uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara karena dianggap melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa Korea Utara dilarang melakukan berbagai uji coba senjata militer bak uji coba nuklir maupun rudal balistik³. Tentu saja Jepang merasa terancam dengan kepemilikan senjata yang dimiliki oleh Korea Utara yang sering di uji coba dikarenakan jarak jangkauan dari senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dengan mudah mampu menjangkau Jepang. Selain jarak jangkau dari senjata, Korea Utara juga melakukan pelanggaran atas sanksi yang telah dijatuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu dengan melakukan uji coba senjata balistik. Perilaku yang ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh Jepang atas tindakan pelanggaran Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut penulis merupakan sebuah bentuk dari rasa ketakutan atau *paranoid* yang dialami Jepang yang sudah menjadi-jadi dimana sikap Jepang tersebut menunjukkan ingin menarik simpati dunia terhadap tindakan Korea Utara agar menjadi sosok musuh bersama yang berbahaya dan patut untuk diwaspadai. Berdasarkan dari latar belakang yang telah di tuliskan di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan berikut, bagaimana respon Jepang terhadap uji coba senjata oleh Korea Utara yang dianggap dapat mengancam keamanan Jepang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dimana menggunakan analisa data-data yang bersifat non angka, data ini dapat berupa laporan, berita dan pernyataan. jika terdapat tabel, skema,gambar dan diagram hal ini di gunakan untuk memperkuat deskripsi analisa

³ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160207_dunia_roket_koreautara

yang digunakan dalam penulisan proposal ini saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan adalah studi kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, koran artikel yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

Pembahasan

Balance of Power, yaitu merupakan konsep yang ada dalam Hubungan Internasional terkait dengan perimbangan kekuatan. Balance of Power muncul akibat dari suatu kondisi negara yang berusaha untuk memperoleh power untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang dapat mengakibatkan negara lain merasa terancam atas tindakan yang dilakukannya. Negara yang terancam akan cenderung melakukan Balance of Power atau perimbangan kekuatan untuk membendung maupun melindungi dirinya dari negara lain⁴. *Balance of Power* ini sendiri memiliki tiga bentuk, dua diantaranya yaitu :

Hard Balancing merupakan strategi yang sering dipamerkan oleh negara-negara yang terlibat sangat intens dalam hal persaingan. Sehingga negara mengadopsi strategi untuk membangun dan memperbaharui kemampuan militer yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk memelihara aliansi dan counteralliances yang di gunakan untuk mencocokkan kemampuan dari rivalnya. Hard balancing ini lebih sering digunakan dalam konsepsi pandangan realis secara tradisional maupun neorealis⁵.

Soft Balancing merupakan perimbangan yang dilakukan secara perlahan dalam aliansi. Hal ini terjadi ketika terdapat minimnya pemahaman keamanan antara satu dengan yang lain untuk menyeimbangkan keadaan yang berpotensi mengancam atau meningkatkan ketegangan. Soft Balancing ini biasanya dilakukan oleh kolaborasi-kolaborasi lembaga-lembaga regional

⁴ Paul, T.V., James J. Writz, and Michel Fortman. 2004. Balance of Power : Theory and Practice in the 21th Century. California: Stanford University, hal 3

⁵ Ibid

maupun internasional dimana kebijakan ini dikonversi untuk membuka strategi hard balancing jika kompetisi masalah keamanan menjadi intens dan mengancam⁶.

Dari kedua bentuk tersebut penulis meyakini bahwa Jepang menggunakan dua bentuk dari *Balance of Power*, yaitu *hard balancing* dan *soft balancing*. Hal tersebut di tunjukkan dalam *hard balancing* yang dilakukan oleh Jepang dengan membangun dan memperbaharui kemampuan militer yang dimilikinya, membuka program ballistic missile defence serta amandemen mengenai undang-undang militer merupakan langkah awal Jepang dalam menggunakan *hard balancing*, dimana sebelumnya Jepang tidak diperkenankan maintenance serta upgrade militer yang dimilikinya serta dibatasinya gerak militer Jepang⁷ hal tersebut dianggap oleh penulis sebagai awal dari langkah penggunaan *hard balancing* oleh Jepang. Perihal penggunaan *soft balancing*, Jepang meningkatkan hubungannya kembali dengan Amerika Serikat terutama aliansinya serta membangun kembali hubungan antara Jepang dengan negara di Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Selatan.

Korea utara merupakan negara yang melakukan uji coba senjata secara besar-besaran dan intensif. Kepemilikan senjata nuklir serta pengklaiman mempunyai bom hidrogen menjadikan Korea Utara sebagai sorotan dari pada dunia internasional. Pengembangan senjata yang dilakukan oleh Korea Utara tentunya membuat negara-negara di sekitar kawasan Asia Timur khususnya Jepang merasa khawatir. Jepang merasa terancam karena jangkauan rudal uji coba senjata milik Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang, hal tersebut di buktikan dengan kejadian pada tanggal 7 Februari 2016 lalu sempat melewati bagian selatan pulau Okinawa. Selain uji coba senjata milik Korea Utara, kondisi iklim keamanan di

⁶ Ibid

⁷ Japan Constitution, Chapter II : Renunciation of War, Article number 9

kawasan Asia Timur yang tidak stabil membuat Jepang juga ingin menunjukkan kekuatan yang dimilikinya⁸.

Paradigma realisme mengeluarkan konsep *Balance of Power* ini, yang kemudian melahirkan konsep aliansi dan bandwagoning. Dalam perkembangannya konsep ini mengalami revisi oleh *Stephen M Waltz* dengan *Balance of Threat* mengemukakan terdapat dua alasan mengapa negara membentuk sebuah aliansi. Pertama untuk menghentikan atau mencegah negara lain berpotensi sebagai negara yang memiliki kekuatan hegemoni. Kedua, aliansi sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain yang tergabung dalam aliansi terutama negara lemah, karena negara lemah lebih membutuhkan perlindungan dari pada negara kuat, selain itu hal tersebut dapat menambah pengaruh atas negara tersebut. Jika melebihkan aliansi kepada negara yang lebih kuat, hanya akan mendapat sedikit pengaruh atas negara kuat tersebut. Bergabung dengan sisi yang lemah maupun kuat dalam aliansi merupakan sebuah pilihan tersendiri⁹.

Berdasarkan asumsi yang dikeluarkan *Walt* tersebut, ketidak adaan distribusi kekuatan yang berimbang dalam sistem internasional yang anarki, negara akan cenderung menggalang aliansi dengan maupun melawan kekuatan yang dianggap mengancam. Aliansi menurut *Walt* bisa diartikan sebagai respon atas ketidak seimbangan ancaman yang ada bukan hasil dari ketidakseimbangan kekuatan. Dalam *Balance of Threat* ini *balancing* merupakan respon atas negara atau beberapa negara lain yang memiliki power lebih. *Power* disini dilihat dari sisi kepemilikan terhadap sistem, menurut *Walt* kepemilikan *power* berupa senjata nuklir atau rudal balistik akan mengancam keamanan kawasan. Hal tersebut sangat berbeda dari *Balance of Power* yang melihat pengaruh *power* terhadap sistem internasional.

⁸<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/30/08361941/Militer.Jepang.Keluar.dari.Pasifisme.Menuju.Ekspansi.ke.Luar.Negeri>

⁹ Stephen M. Walt. "Alliances : Balancing and Bandwagoning"

Menurut *Balance of Threat* Jepang melihat sosok Korea Utara sebagai negara yang memiliki ancaman kepada Jepang dan kawasan, dimana Jepang merespon Korea Utara sebagai sosok negara yang memiliki kekuatan lebih di bandingkan dengan Jepang, dikarenakan jangkauan senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dapat menjangkau Jepang. Sedangkan menurut *Balance of Power*, dalam rangka mengatasi ancaman yang di buat oleh Korea Utara, Jepang melakukan aliansi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dikarenakan kedua negara tersebut merupakan negara yang berada di dalam satu kawasan Asia Timur dan juga berdekatan dengan Korea Utara.

Selain menggunakan Balance of Power, konsep kepentingan nasional juga digunakan dalam penulisan ini. Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan konsep yang populer untuk menganalisa, mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional dalam analisa hubungan internasional¹⁰. Kepentingan nasional suatu negara dinilai penting karena cenderung mengacu kepada nilai maupun tujuan yang terdapat di dalam kepentingan nasionalnya. Menurut Hans J Morgenthau kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun melalui kerjasama. Dalam pandangannya, kemampuan minimum negara bangsa dalam kepentingan nasional adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain¹¹. Dalam hal ini Jepang memerlukan sesuatu yang digunakan untuk menjaga eksistensinya serta pihak yang dianggap mampu diajak bekerja sama dalam rangka melindungi atribut yang dimilikinya.

¹⁰ Mas'ood Mochtar.1990."Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan Metodologi."

¹¹ Ibid

Dalam penulisan ini juga tak lepas pula dengan aliansi, dalam kamus hubungan internasional *alliance* merupakan sebuah perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatangan perjanjian diserang oleh negaralain; selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama diantara negara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral atau multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau terorganisir, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan perang. Meskipun aliansi dapat membantu terciptanya kedamaian serta rasa aman, aliansi juga dapat menjadi sumber ketegangan internasional. Mengingat Jepang memiliki aliansi dengan Amerika Serikat. Sejak diamandemennya undang undang militer Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meyakini bahwa dengan amandemen ini diyakini perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat serta dapat meningkatkan aliansi dari kedua negara¹². Selain itu perwujudan dari aliansi yang dilakukan oleh Jepang dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara adalah melakukan latihan gabungan untuk meningkatkan koordinasi terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.

Dengan diamandemennya undang-undang militer Jepang untuk kembali meningkatkan kemitraan strategis dan aliansi dengan Amerika Serikat dalam konteks militer sebagai respon atas tindakan Korea Utara serta menjadi pencegahan atas kemungkinan adanya serangan yang akan dilakukan oleh Korea Utara apabila terjadi konflik di kawasan Asia Timur. dalam menghadapi Korea Utara, Jepang menggunakan persepsi ancaman, dimana ancaman juga merupakan dasar dari pementukan alliansi dengan negara lain. aliansi yang dilakukan Jepang dengan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer dapat memperkuat keamanan kawasan serta Jepang itu sendiri karena jaminan keamanan yang

¹²<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/30/08361941/Militer.Jepang.Keluar.dari.Pasifisme.Menuju.Ekspansi.ke.Luar.Negeri>

diberikan oleh sistem aliansi tersebut dimana Jepang telah merasakan ancaman dari Korea Utara.

Kesimpulan

Dengan kepemilikan senjata serta uji coba senjata yang sering dilakukan oleh Korea Utara, Jepang sebagai sebuah negara yang memiliki lokasi geografis yang berdekatan dengan Korea Utara merasa terancam. Respon Jepang atas tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu secara internal Jepang sendiri melakukan perubahan atas kebijakan pertahanan Jepang dengan meningkatkan status Justice Defense Agency menjadi Ministry of Defense serta mengamandemen Undang-undang militer Jepang sehingga militer Jepang dapat beroperasi di luar Jepang, membuka program mengenai ballistic missile defence sebagai bentuk antisipasi Jepang terhadap uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara maupun sebagai bentuk pertahanan dirinya. Secara eksternal, Jepang mulai lagi menata hubungannya kembali dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok, serta melakukan penataan kembali hubungan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat serta berperan aktif dalam kerjasama keamanan internasional.

Referensi

1. Djelantik Sukawarsini.2015."Asia Pasifik konflik, kerjasama dan relasi antarkawasan."
Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
2. Japan Constitution, Chapter II : Renunciation of War, Article number 9
3. Jill Steans & Lloyd Pettitford.2009."Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema." Jakarta :
Pustaka Pelajar,
4. KIM Jina. 2015. Source and Objective of North Korea Foreign Policy Identity, Values, and
Negotiating Behavior. East-West Center
5. Kwan-young Kim. 1999. "Japan and Korea : A Turbulent History."

6. Luhn John., "North Korea : The Nuclear Issue and Prospect for Change", Research Paper, 10 January 2007
7. Mas'oeud Mochtar.1990."Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan Metodologi."
8. Paul, T.V., James J. Writz, and Michel Fortman. 2004. Balance of Power : Theory and Practice in the 21th Century. California: Stanford University, hal 3
9. Stephen M. Walt. "Alliances : Balancing and Bandwagoning"

Website :

http://www.kompasiana.com/anthropod/korea-terbagi-dua-siapa-biang-keroknya_5528434d6ea834e71d8b461d

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160207_dunia_roket_koreautara